



**MATERI PEMBELAJARAN PPKn BERBASIS NILAI LOKAL:  
IDENTIFIKASI DAN IMPLEMENTASI**

Winarno✉

**Info Artikel**

**Sejarah Artikel:**

Diterima Mei 2018  
Disetujui Juni 2018  
Dipublikasikan Juli  
2018

**Keywords:**

*PPKn learning,  
value education,  
moral norm, social  
norm*

**How to Cite:**

Winarno (2018).  
Materi Pembelajaran  
PPKn Berbasis Nilai  
Lokal: Identifikasi  
dan Implementasi.  
*Jurnal Pancasila  
dan  
Kewarganegaraan*,  
3(2), pp. 10-20.  
DOI:  
<http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp10-20>

**Abstrak**

PPKn sebagai pendidikan nilai moral memerlukan seperangkat nilai sebagai materi pembelajaran sekaligus pesan yang hendak disampaikan kepada peserta didik. Nilai-nilai itu meliputi nilai luhur bangsa Pancasila maupun nilai-nilai lokal sebagai cerminan dari heterogenitas bangsa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai lokal budaya Jawa sebagai materi dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Metode penelitian adalah deskriptif dengan teknik analisis dokumen. Hasil penelitian adalah ditemukan sejumlah nilai lokal Jawa yang layak sebagai isi pendidikan nilai di PPKn. Nilai lokal itu adalah nilai-nilai Jawa yang termuatkan dalam norma moral dan norma sosial. Pembelajaran nilai dilakukan dengan pendekatan program dengan mengintegrasikan nilai lokal yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan sosial Pancasila ke dalam materi PPKn.

**Abstract**

*PPKn as moral education requires a set of values as learning materials as well as messages to be conveyed to learners. These values include Pancasila and the local values as a reflection of the heterogeneity of the nation. The study aims to identify the local value of Javanese culture as material and how to implement it. The research method is descriptive with document analysis technique. The result was found any number of Javanese local values as the content of value education in PPKn. The Javanese local values are contained in moral norm and social norm. Value learning was done with a program approach by integrating local values in line with the humanitarian and social values of Pancasila into PPKn materials.*

## PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan reformasi bidang pendidikan di Indonesia adalah desentralisasi pendidikan. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi pendidikan menginginkan bahwa pendidikan tidak boleh diseragamkan tetapi berorientasi pada keanekaragaman lingkungan dan budaya. Karena itu nilai-nilai budaya lokal, karakteristik daerah dan potensi-potensi wilayah menjadi referensi berharga untuk diikutsertakan sebagai bagian utama bagi pendidikan yang didesentralisasi dan diotonomisasi, terutama dalam hal materi atau isi pembelajaran. Misalnya suatu daerah melakukan kebijakan tentang kurikulum muatan lokal.

Namun di sisi lain reformasi telah memunculkan berbagai gugatan dan hujatan pada luaran pendidikan kita khususnya karakter yang baik. Gagalnya luaran pendidikan saat ini ditandai oleh banyaknya tindakan im-moral, tindak-asusila, kenakalan generasi muda, tawuran antarsiswa, kejahatan narkoba dan sebagainya. Sebagaimana pula dikemukakan Suparno (2012) bahwa di tengah masyarakat kita terdapat peristiwa yang menyedihkan diantaranya korupsi yang begitu meluas dan menggilai; budaya kurang santun dalam mengungkapkan perbedaan pendapat seperti sering terlihat di DPR; tawuran dan kekerasan di lingkungan pendidikan menengah maupun PT dan konflik horizontal di tengah masyarakat yang sering memakan korban banyak jiwa. Hal demikian menandakan semakin pentingnya pendidikan karakter.

Sesuatu yang amat ironis pula ketika para siswa kita setelah selesai ujian nasional, mereka berhamburan keluar ke jalan raya, berpawai, corat-corek pakaian bahkan ada yang terlibat perkelahian. Tidak ada bekas dari apa yang dipelajari di kelas untuk

diwujudkan dalam keseharian. Boleh jadi apa yang diujikan tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan dalam keseharian. Pada titik kulminasinya gejala ini telah memunculkan terjadinya krisis nilai. Kualitas moral dan karakter warga muda kita amat memprihatinkan. Krisis moral menjadi kenyataan yang sungguh ironis dan menyedihkan.

Menurut Rachman (tt) krisis moral ini disebabkan oleh belum efektifnya pendidikan moral dalam arti luas. Karena itu, dewasa ini banyak pendapat bahwa pendidikan nilai belum mampu menyiapkan warga muda menjadi warga negara yang lebih baik. Lebih lanjut Megawangi (2007) menyatakan bahwa salah satu sebab dari kegagalan tersebut karena pendidikan kita belum mempunyai kurikulum pendidikan karakter, tetapi yang ada adalah pelajaran tentang pengetahuan karakter (moral) yang tertuang dalam pelajaran agama, kewarganegaraan dan Pancasila. Juga masih banyak metode hafalan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Siswa hanya menguasai materi pengetahuan yang keberhasilannya diukur dengan kemampuan anak menjawab soal terutama dengan pilihan ganda.

Dalam mencermati masalah ini, sebagian pihak menyatakan bahwa pendidikan atau pelajaran yang bernafaskan pendidikan moral seperti agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bahasa dan pendidikan jasmani, perlu untuk diperbaharui, dirubah atau bahkan mungkin diganti. Sebagian pihak lain menyuarakan perlunya menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti yang pada masa lalu pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Pendidikan budi pekerti diharapkan mampu meminimalisasi adanya krisis moral dan mampu berperan dalam membina warga muda. "*Trend*" sekarang adalah memunculkan konsep pendidikan karakter (*character education*). Pendidikan karakter inilah yang saat ini

sejak dicanangkan tanggal 2 Mei 2010 menjadi wacana penting pendidikan kita. Bahkan sekarang pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Menghubungkan fenomena tentang desentralisasi pendidikan dan fenomena krisis moral tersebut di atas maka penting untuk menempatkan kembali pelajaran PPKn yang berbasis nilai moral lokal (pendidikan nilai moral). PPKn merupakan bentuk dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang yang multidisipliner memuat berbagai fungsi pendidikan yakni sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan kebangsaan, kewarganegaraan kewarganegaraan dan pendidikan nilai moral (Sapriya, 2012). Nilai lokal mencerminkan semangat desentralisasi pendidikan, sedangkan pelajaran PPKn berdasar kurikulum 2013 mencerminkan pendidikan nilai moral.

Pembahasan dalam artikel ini akan mengidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan pelajaran PPKn kemudian analisis yang berkenaan tujuan penulisan ini. Apakah PPKn masih memosisikan identitasnya selaku pendidikan nilai moral di Indonesia. Selanjutnya nilai nilai lokal apakah yang layak disertakan sebagai pendidikan nilai moral dalam PPKn 2013. Nilai lokal yang dimaksud dalam bahasan ini adalah nilai kontekstual dengan tempat dimana PPKn tersebut dibelajarkan. Dalam tulisan ini akan dianalisis nilai nilai lokal Jawa, dikarenakan latar belakang penulis adalah budaya Jawa.

## **METODE**

Guna menjawab permasalahan sebagaimana dinyatakan di atas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis adalah sumber tertulis yang berkenaan dengan pelajaran PPKn berdasar kurikulum 2013. Yakni buku

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016, Permendikbud No 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah dan buku referensi lain terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang hasilnya berupa teks narasi untuk mendeskripsikan nilai nilai lokal manakah dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran PPKn kurikulum 2013.

## **ANALISIS**

### ***Karakteristik PPKn***

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan pelajaran yang sebelumnya bernama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Kurikulum 2006, yang sifatnya pembaharuan. Pembaharuan atau penyempurnaan ini dilaksanakan atas pertimbangan : 1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dijadikan sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan bagi keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran PPKn. 2) Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar NRI 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditempatkan sebagai bagian integral dari PPKn, sebagai wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Menurut Buku Guru PPKn kelas X terbitan Kemendikbud (2017), substansi dasar PPKn adalah pendidikan Pancasila (pendidikan nilai, pendidikan karakter) yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Secara umum tujuan pelajaran PPKn jenjang pendidikan dasar dan menengah ialah mengembangkan potensi siswa pada

semua dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (3) keterampilan kewarganegaraan berupa kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Tujuan khusus pelajaran PPKn adalah peserta didik mampu: 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai moral Pancasila baik secara personal maupun sosial; 2) memiliki komitmen konstitusional yang didasari sikap positif dan pemahaman yang utuh tentang Undang-Undang Dasar NRI 1945, serta peraturan perundangan lainnya; 3) berpikir kritis, rasional, kreatif, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4) Terlibat secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, warga bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang hidup dalam berbagai tatanan sosial kultural.

Berdasar hal di atas, PPKn memiliki kedudukan sebagai berikut. Pertama, sebagai pendidikan nilai, moral, karakter, dan kewarganegaraan yang khas Indonesia yang berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Kedua, sebagai media pendidikan nilai, moral, karakter Pancasila dan pengembangan kemampuan psikososial kewarganegaraan Indonesia yang koheren dengan pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang undang No. 20 Tahun 2003.

Dengan demikian, pelajaran PPKn di jenjang pendidikan dasar dan menengah memiliki ruang lingkup atau substansi kajian sebagai berikut. 1) Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ideologi nasional, dan sebagai pandangan hidup bangsa. 2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis yang menjadi landasan konstitusional bagi kehidupan bernegara 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai kesepakatan final mengenai bentuk Negara Republik Indonesia dan 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai sesanti yang berisikan filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan di Indonesia

### ***PPKn Sebagai Pendidikan Nilai***

Merujuk pada karakteristik PPKn di atas, jelas bahwa PPKn sebagai mata pelajaran mengemban misi atau fungsi sebagai pendidikan nilai. Pendidikan nilai memiliki padanan makna dengan pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan kesusilaan, pendidikan dan “trend” sekarang ini dengan istilah pendidikan karakter (*character education*).

Pada dasarnya pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, etik dan segala hal yang berkaitan dengan kebajikan sebagai isi yang hendak diinternalisasikan dalam diri anak. “*Character education is an educational movement to help students develop important core, ethical and performance values such as caring, honesty, diligence, fairness, fortitude, responsibility, and respect for self and others*”. (Tsypenyuk, tt).

Dalam pendidikan karakter terdapat sejumlah nilai, Megawangi (2007) menyatakan *character education* sekarang ini memang sedang tumbuh di Amerika Serikat, untuk menggantikan istilah *value education*. Pendidikan nilai di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 1980-an, yakni dengan adanya

pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dengan demikian Indonesia sesungguhnya telah lama mengalami praksis pendidikan karakter ini. Pelajaran PPKn saat ini adalah bagian dari PKn (pendidikan Kewarganegaraan) yang salah satu fungsinya adalah sebagai pendidikan nilai atau karakter.

Yang dimaksud PPKn sebagai pendidikan nilai adalah pendidikan nilai moral. Hal ini dikarenakan konsep tentang moral itu sendiri adalah nilai, akan tetapi, nilai tidak hanya mencakup nilai moral. PPKn sebagai pendidikan nilai dewasa ini tetap mendapatkan pengakuan dalam praktek pendidikan kita. Menurut Muchtar (2007) bahwa salah satu ciri dan pendekatan PKn ialah sebagai pendidikan nilai moral, yang lebih khusus lagi adalah pendidikan nilai dan moral Pancasila. Ruminiati (2006) juga menyatakan bahwa pelajaran PKn SD berfungsi sebagai pendidikan nilai, yakni bertugas mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. PKn sebagai program pendidikan berada dalam koridor “value based education” (Budimansyah & Suryadi, 2008). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan nilai dalam hal ini adalah nilai moral. Melalui pendekatan filsafati dikatakan bahwa Pancasila adalah suatu sistem etika, sebuah sistem nilai (Kaelan, 2000).

Tujuan pendidikan nilai adalah membentuk pribadi peserta didik supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik. Kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik dalam suatu masyarakat berpatokan pada nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan nilai dalam konteks Indonesia adalah pendidikan akan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian warga muda. Nilai nilai

moral masyarakat Indonesia terkristalisasi pada masing masing sila Pancasila. Lima nilai Pancasila merupakan nilai luhur bangsa dan karena itu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia . Nilai Pancasila adalah nilai dasar yang dapat dikembangkan secara dinamis menjadi nilai nilai instrumental maupun praksis.

### **Masalah Nilai dalam PKn**

#### **1. Apakah nilai itu**

Pada dasarnya nilai (*value*) adalah sesuatu yang berharga dan berguna. Secara filsafati, nilai merujuk pada kata benda abstrak yang berarti keberhargaan dan kebaikan. Menurut Kaelan (2000), nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada obyek, bukan objek itu sendiri. Nilai memiliki sifat sebagai suatu yang realitas abstrak , normatif dan sebagai motivator (Daroeso, 1986). Nilai tidak dapat diindera atau dilihat, sedang yang dapat diamati adalah obyek yang bernilai tersebut . Sifat normatif nilai berarti nilai mengandung harapan , cita-cita dan keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal ( *das sollen* ) . Manusia bertindak berdasar pada nilai yang diyakininya. Nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator manusia dalam bertindak. Nilai yang abstrak tersebut diwujudkan kedalam bentuk norma sebagai pedoman berperilaku.

Notonagoro dalam Kaelan (2000) menyebutkan adanya 3 (tiga) macam nilai yaitu :

- a. Nilai material, yakni nilai yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan fisik manusia.
- b. Nilai vital , yakni nilai yang berguna bagi manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerohanian yakni nilai yang berguna bagi rohani atau spiritual manusia . Nilai kerohanian dapat di bedakan atas 4 (empat) macam :

- 1) nilai kebenaran yang bersumber pada akal ( rasio, budi , cipta) manusia .
  - 2) nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (emotion) manusia .
  - 3) nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak ( karsa , will) manusia.
- d. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak . Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Menurut Rachman (tt), nilai dibagi dalam 2 (dua) yakni nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai dalam diri pribadi kemudian berkembang menjadi perilaku dalam memperlakukan orang lain. Termasuk nilai-nilai nurani ialah cinta damai, keandalan diri, disiplin, kejujuran, tahu batas, kemurnian, keberanian, dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu diberikan yang kemudian akan diterima sesuai yang diberikan. Termasuk nilai-nilai memberi adalah hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, setia, dapat dipercaya, baik hati, ramah, murah hati, dan adil.

Nilai-nilai yang dibelajarkan pada siswa di sekolah itu terintegrasi dalam suatu mata pelajaran. Namun ada pula mata pelajaran yang memang fungsi utamanya adalah mengemban nilai-nilai kepribadian, dan budi pekerti seperti pelajaran agama, budi pekerti dan pendidikan kewarganegaraan. Sejalan dengan pandangan bahwa PPKn adalah pendidikan nilai maka nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari materi dalam PPKn. Nilai itu bisa berupa nilai luhur bangsa yang tercerminkana dalam Pancasila dan nilai nilai kedaerahan yang memang layak untuk dibelajarkan. Dalam hal ini, nilai moral (nilai kebaikan) menjadi fokus dan bahan bagi pelajaran PPKn.

Nilai dapat bersumber dari agama, budaya dan nasionalisme

atau kerangka hidup bersama dalam hidup bernegara (Bertens, 1983). Ajaran agama banyak sekali memberi dan menjadi sumber bagi tersedianya nilai-nilai kehidupan , demikian pula dengan adat istiadat atau kebudayaan yang berlaku di suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat suatu sistem nilai. Negara dapat pula menciptakan atau mengembangkan seperangkat nilai yang dijadikan acuan dalam kehidupannya. Dalam hal ini nilai nilai dalam pelajaran PPKn dapat bersumber pada nilai agama, budaya dan Pancasila.

Apabila dianalisis nilai-nilai dalam Pancasila maka didalamnya dapat berkategori dua. Pertama, nilai nilai moral yang berhubungan dengan pribadi manusia atau hakikat kemanusiaan yaitu dalam nilai keTuhanan dan nilai kemanusiaan. Dua, nilai-nilai moral yang berhubungan dengan manusia dalam lingkungan hidup bersama sebagaimana nilai nilai yang terkandung dalam sila persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai ini merupakan pula nilai sosial. Pengembangan dan penjabaran nilai yang nantinya akan menjadi bahan materi pelajaran PPKn hendaknya pula berpijak dari dua kategori tersebut. Dari dua kategori inilah menurut penulis, PPKn merupakan pendidikan nilai sekaligus pendidikan kewarganegaraan. Adanya nilai nilai kemanusiaan mendorong perlunya pendidikan nilai, sedangkan pendidikan kewarganegaraan didasarkan atas perlunya nilai nilai sosial bermasyarakat ditanamkan pada anak didik.

Adapun yang dimaksud nilai lokal dalam pandangan penulis menunjuk pada nilai- nilai budaya yang ada di masyarakat Indonesia, sebab nilai agama bersifat universal sedang nilai Pancasila *in concreto* bersifat partikular bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun demikian tidak semua nilai budaya menjadi sumber bagi PPKn tetapi

hanyalah nilai-nilai budaya yang merujuk pada klasifikasi nilai-nilai moral yang menjadi isi dari PPKn berbasis nilai lokal.

Nilai-nilai lokal itu hendaknya pula dikategorikan kedalam 2 (dua) pembagian sebagaimana penulis sebutkan di atas. Pertama, nilai-nilai moral lokal yang berkaitan dengan peningkatan derajat dan harkat kemanusiaan dan dua, nilai-nilai moral sekaligus nilai sosial lokal yang berhubungan dengan manusia dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat. Pengkategorian ini bukan bermaksud menyeragamkan materi pendidikan nilai namun semata-mata mempertahankan identitas bahwa PPKn adalah pendidikan nilai moral yang tetap menggunakan Pancasila sebagai rujukan nilai sebagai nilai nasional dan bahwa PPKn dapat pula mengakomodasi nilai-nilai lokal kedaerahan yang diterima sebagai nilai moral.

Untuk mengangkatnya sebagai sumber materi pelajaran, nilai moral lokal ini perlu disistematisasikan, dirancang disesuaikan dengan prosedur penyampaian bahan ajar seperti, mengorganisasi dari materi yang mudah ke materi yang sukar, dari materi sederhana ke materi kompleks, dan dari materi yang sifatnya konkrit menuju ke materi yang abstrak. Selain itu juga perlu pengolahan materi nilai lokal sesuai dengan tingkat usia, perkembangan kognitif dan kematangan peserta didik.

## 2. Isi Pendidikan Nilai

Nilai perlu dijabarkan dalam bentuk norma-norma. Dari pengembangan norma-norma ini kita dapat mengingankan nilai apa yang hendak diajarkan kepada anak. Dalam silabus atau kurikulum yang akan tampak tidak hanya nilai tetapi juga norma sebagai penjabaran nilai di atas. Norma bersifat eksplisit, preskriptif dan imperatif sehingga semakin jelas bagaimana nilai itu hendak disampaikan.

Beberapa norma yang dapat menjadi isi dari pendidikan nilai dapat penulis sampaikan sebagai berikut. 1) Etika dan sopan-santun dalam pergaulan, 2) Pengenalan watak dan karakter diri, 3) Toleransi dan adaptasi, saling menghormati sesama manusia, 4) Mentaati ajaran agama, adat-istiadat, dan hukum negara, 5) Membentuk sikap kejujuran, 6) Membina sikap gotong-royong dan tolong-menolong, 7) Pengenalan jati-diri, potensi diri, motivasi diri dan evaluasi diri, 8) Pengenalan wawasan diri yang lebih tinggi, wawasan kerja, dan cita-cita, 9) Pengembangan hobi dan kreativitas, 10) Ketahanan mental menghadapi kenakalan remaja, 11) Ketahanan mental menghadapi godaan alkohol dan narkoba, 12) Ketahanan mental menghadapi godaan pergaulan bebas tak terbatas, 13) Mengenal lingkungan pergaulan agar tidak terjerumus ke pergaulan negatif, 14) Keseimbangan antara hak dan kewajiban diri, 15) Penghargaan terhadap perbedaan dan pendapat dan 16) Pengendalian diri.

PPKn sebagai pendidikan nilai maka salah satu pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan berbasis nilai (*value based approach*). Dalam hal PPKn berbasis nilai lokal maka diupayakan nilai-nilai lokal yang bisa mewujudkan dirinya kedalam norma-norma di atas. Bahwa tidak semua nilai lokal boleh diangkat sebagai materi pendidikan, namun perlu ada kesadaran bersama bahwa hanya nilai-nilai lokal yang mendukung harkat kemanusiaan dan nilai lokal sosial yang menciptakan keharmonisan hubungan yang boleh dijadikan materi atau isi pendidikan nilai.

Sehubungan dengan nilai lokal, di sini penulis ingin sedikit menyampaikan budaya Jawa sebagai contoh nilai lokal. Budaya memiliki banyak simbol baik verbal maupun non verbal, yang bersifat filosofis dan merupakan norma dalam kehidupan. Filosofi dan norma tersebut apabila diikuti dan diterapkan akan dapat

menciptakan kehidupan yang harmonis dalam suatu sistem sosial yang dinamis (Rahayu, dkk, 2014). Nilai dan norma tersebut dapat berupa norma moral dan norma sosial. Nilai-nilai moral dan sosial dalam budaya Jawa pada umumnya terdapat dalam serat-serat jawi, tetembangan jawa dan berbagai ungkapan jawa (Bratawijaya, 1997).

Berikut ini berbagai contoh norma lokal budaya Jawa yang dikaitkan secara langsung dengan jenis nilai yang diajarkan.

- a. Norma-norma sebagai perwujudan nilai moral, yakni 1) aja sok adigang adigung adiguna, 2) aja dumeah, 3) aja rumangsa bisa ning bisaa rumangsa, 4) napak tilas tiyang sepuh, 5) aja sreji, drengki, iri, jahil, metahakil, dahwen, 6) aja lemer, lonyo, nyumur gumuling, ambutut arit lan angrong prasanakan, 7) nglakonono lima sembah, 8) ajining diri soko kedaling lathi, ajining raga ana ing busana, 9) sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti, 10) ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa banda, weweh tanpa kelangan, 11) nrima ing pandum
- b. Norma-norma sebagai perwujudan nilai sosial, yakni 1) rukun agawe santoso crah agawe bubrah, 2) duweni rasa pangrasa, 3) tepa selira, 4) melu handarbeni, wajib hangrungkebi, mulad sarira hangrasawani, 5) ing ngarsa sun tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, 6) gemi, nastiti, ngati ati, 7) kepemimpinan hastha brata, 8) sabda pandita ratu, 9) berbudi bawaleksana, 10) sepi ing pamrih rame ing nggawe

### ***Impelementasi Nilai dalam Proses Pembelajaran PPKn***

#### **1. Pendekatan program**

Pendekatan program diartikan sebagai cara kita di dalam mengembangkan suatu program atau bahan materi pelajaran (Winarno, 2000). Penyusunan materi pelajaran PPKn

sebagai pendidikan nilai moral perlu berpijak kepada:

#### **a. Pendekatan nilai moral**

Mengembangkan materi pembelajaran dengan pendekatan nilai moral artinya menjadikan suatu nilai sebagai dasar pengembangan. Nilai moral harus menjadi isi (entitas inti) dari setiap bahan materi pelajaran PPKn. Sebuah nilai moral yang ditetapkan selanjutnya dikembangkan menjadi materi pembelajaran

#### **b. Pendekatan multidimensional**

Pengembangan materi pembelajaran diupayakan mampu membentuk keseluruhan dimensi peserta didik. Dimensi peserta didik tersebut adalah 3 (tiga) ranah kemampuan, yang meliputi, a). Kognitif berupa fakta, konsep, teori, dalil, dan definisi. Dalam kajian kewarganegaraan disebut sebagai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowlegde*), b). Affektif berupa nilai, sikap, norma, moral. Dalam kajian kewarganegaraan disebut sebagai sikap atau kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) dan c). Psikomotor berupa tata cara, prosedur, aturan, dan perilaku. Dalam kajian kewarganegaraan disebut sebagai kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*)

#### **c. Pendekatan berpusat pada siswa (student centered)**

Materi pembelajaran yang dikembangkan mampu memicu kearah pembelajaran aktif siswa. Oleh karena itu perlu menyusun materi yang mampu mengupayakan pembelajaran PPKn yang siswanya aktif, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator.

Pendekatan program dimulai dengan menentukan klasifikasi besar nilai yang menjadi isi dari PPKn. Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa klasifikasi nilai sesuai dengan kategori nilai dalam Pancasila, maka dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu nilai-nilai moral yang mendukung kemanusiaan dan nilai moral sosial dalam kerangka hidup bersama. Dari dua klasifikasi nilai kemudian dirumuskan berbagai nilai yang masuk

dalam klasifikasi dua tersebut. Misal dari nilai pertama kita merumuskan nilai kejujuran, nilai kedisiplinan dan nilai tanggung jawab. Dari nilai kedua kita berhasil merumuskan nilai keadilan, nilai kasih sayang dan nilai kebersamaan. Kemudian dari berbagai nilai yang telah dirumuskan kita carikan norma *sepi ing pamrih rame ing nggawe*.

Pendekatan program yang digunakan dapat memakai strategi *top down* yakni dari klasifikasi nilai moral kemanusiaan dan nilai moral sosial lalu mengidentifikasi nilai-nilai turunannya. Dapat juga memakai strategi *bottom up*, dimulai dari identifikasi nilai atau norma lokal menuju pada rumusan nilai moral kemanusiaan dan nilai moral sosial. Yang pokok dari hasil pendekatan ini adalah adanya hubungan yang sistematis dan terorganisir antara nilai dan norma yang hendak dibelajarkan.

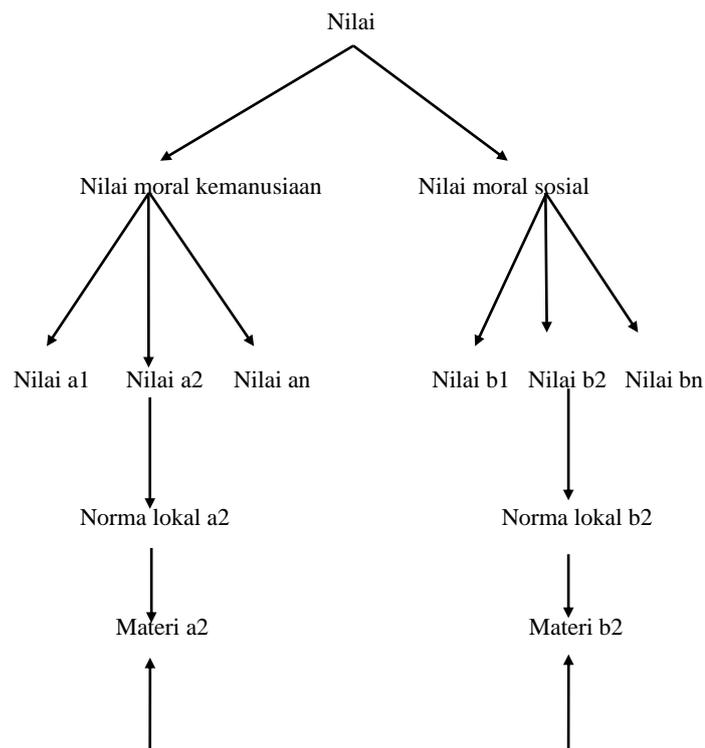
Norma atau nilai lokal yang sudah teridentifikasi dari hasil pendekatan tersebut selanjutnya disusun menjadi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan kandungan aspek pengalaman dan kompetensi guru sangat menentukan guna mengembangkan materi pelajaran yang demikian.

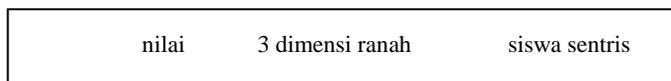
norma-norma lokal yang menjadi cerminan dari nilai tersebut. Norma-norma lokal itu sebelumnya sudah kita identifikasi dan kita kumpulkan. Misalkan, dari nilai kejujuran kita mendapatkan norma *ajining diri ana ing kedaling lathi*, dari nilai kebersamaan kita mendapatkan

kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Di sisi lain menyusun pembelajaran nilai yang mampu memancing keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Materi pembelajaran beraspek kognitif adalah materi yang berisi fakta, konsep, definisi, atau teori. Materi yang beraspek afektif berisi nilai dan norma yang secara eksplisit mengungkapkan keharusan dan larangan dalam bertindak. Materi berspek psikomotor adalah materi yang berisi cara bertindak, contoh contoh dan perilaku. Materi yang menarik keterlibatan aktif siswa adalah materi yang berisikan hal-hal baru, hal-hal unik, dilemma, suatu masalah, unik dan mengundang rasa ingin tahu siswa. Dalam hal ini

Secara skematis pendekatan program dapat dilihat sebagai berikut.





Skema 1. Pendekatan program berbasis nilai

Berdasar alaur skema di atas, bahwa identifikasi nilai lokal, misal nilai lokal Jawa tetaplah perlu berpijak atau gayut dengan nilai Pancasila sebagai nilai nasional. Hal ini penting diupayakan, sebab hanya nilai-nilai lokal yang sejalan dengan nilai Pancasila yang bisa dan layak sebagai materi pembelajaran nilai. Artinya tidak semua nilai lokal dibelajarkan. Perlu diseleksi dan diorganisasikan nilai-nilai lokal manakah yang tidak bertentangan nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya guru PPKn bisa mengidentifikasi dan memasukkan nilai lokal yang sejalan dengan nilai moral kemanusiaan Pancasila dan nilai sosial Pancasila. Identifikasi perlu juga dilakukan dengan menyesuaikan dengan kompetensi dasar aspek sikap yang terdapat pada kurikulum PPKn. Dengan demikian nilai yang akan dibelajarkan tetap sejalan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Nilai lokal yang telah teridentifikasi kemudian diintegrasikan dengan cara mengembangkannya ke dalam suatu materi pembelajaran PPKn.

## SIMPULAN

Pelajaran PPKn berdasar kurikulum 2013 yang berbasis nilai lokal pada hakekatnya PPKn yang bermaterikan nilai moral dan sosial budaya suatu masyarakat tertentu di Indonesia, misal nilai budaya Jawa. Pengkategorian nilai lokal berpijak dari pengorganisasian nilai dalam Pancasila yaitu nilai yang berhubungan dengan kemanusiaan (nilai moral kemanusiaan) dan nilai sosial yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara (nilai moral sosial). Ragam nilai yang akan diangkat sebagai materi

pembelajaran dapat diambil dari nilai nilai lokal yang bersangkutan.

Pengembangan dan pengorganisasian bahan ajar bagi PPKn berbasis nilai lokal atau disebut pendekatan program berbasis nilai berpijak dari pengkategorian nilai nilai yang ada pada Pancasila dan sejalan dengan kompetensi dasar sikap pada kurikulum PPKn 2013. Nilai yang telah teridentifikasi selanjutnya dikembangkan kedalam suatu materi pembelajaran PPKn.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens. (1983). *Etika*. Yogyakarta : Kanisius
- Bratawijaya, Wiyasa. (1997). *Mengungkap & Mengenal Budaya Jawa*. Jakarta: Pradya Paramita
- Budimansyah, Dasim & Suryadi, Karim. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program studi Pendidikan Kewarganegaraan, SPs UPI Bandung
- Daroeso, Bambang. (1986). *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Semarang: Aneka Ilmu
- Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila*. Edisi Reformasi. Yogyakarta : Paradigma.
- Kemendikbud. (2017). *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas X Edisi Revisi*. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Megawangi, Ratna. (2007). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation
- Muchtar, Suwarma. (2007). *Strategi Pembelajaran PKn*. Modul. Jakarta: Universitas Terbuka

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Permendikbud No 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Rachman, Maman. (Tanpa Tahun). *Reposisi, Re-Evaluasi dan Redefinisi Pendidikan Nilai*. Makalah tidak diterbitkan
- Rahayu, Nuryani Tri, dkk. (2014). Model Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Jawa Melalui Pemanfaatan Upacara Ritual. *Jurnal Ilmu Komunikasi* , Vol 12 No 1 April 2014
- Ruminiati. (2006). *Pembelajaran PKn SD*. Jakarta : Proyek PJJ S1 PGSD Dikti Depdiknas
- Sapriya. (2012). *Memperkokoh Posisi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi*. Naskah Pidato
- Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Bidang Pendidikan Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, pada Kamis 26 April 2012. Bandung. Tidak diterbitkan
- Suparno, Paul. (2012) . *Peran Pendidikan Dan Penelitian Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa* . Makalah disajikan dalam Seminar Nasional, LPPM UNY tanggal 11 Mei 2012
- Tsydenyuk, Yulia. (Tanpa Tahun). *Character Education*. Retrieved 23 March 2017, from <https://www.slideserve.com/norm/character-education>
- Winarno. (2000). *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Surakarta : Laboratorium PPKn FKIP UNS . Tidak diterbitkan